

MENANCAPKAN TIANG-TIANG “KAYU BESI”: ADAT DAN SIASAT PARA ELIT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT ¹

EMBEDDING “IRON PILLARS”: CUSTOM AND STRATEGY OF THE ELITE IN KABUPATEN TELUK BINTUNI, WEST PAPUA

I Ngurah Suryawan

Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua
ngurahsuryawan@gmail.com

Abstract

This article discusses about culture value or well-known as “adat” is used as social capital by elite community for economic-politic contestation in Teluk Bintuni District. Background context in this paper is indigenous people relation – especially Sebyar Community – with British Petroleum as corporation. The imagination of “iron” pillars as indigenous house foundation symbol in “kampong-kampung” has brittle. Social transformation has started when people hand over their land to the corporation. The life dependency of indigenous people become absolute aspect when their lost their resources. This article argues discourse about indigenous people drag many interests, especially to the elites of indigenous people for their economic and politic interests. Based on the dynamics that appear in one part of Teluk Bintuni indigenous people, this article believes the imagination of “iron” pillars as social solidarity foundation starting to brittle. Fragility is sabotaged by elite indigenous people pragmatism, then the member imitates their elites.

Keywords: *Adat, Social Capital, Elite, Transformation, Social Solidarity, Pragmatism*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan bagaimana “adat” dijadikan sebagai modal sosial untuk kontestasi ekonomi politik oleh para elit di Kabupaten Teluk Bintuni. Konteks yang melatarbelakanginya adalah relasi masyarakat lokal–khususnya komunitas Sebyar–dengan perusahaan BP (*British Petroleum*). Imajinasi tentang tiang-tiang “kayu besi” yang menjadi simbol pondasi rumah masyarakat di kampung-kampung, kini mulai terlihat rapuh. Transformasi sosial tersebut pada awalnya terjadi saat masyarakat menyerahkan tanahnya ke perusahaan. Ketergantungan kehidupan ke depan menjadi sesuatu yang mutlak saat sumber-sumber penghidupan ekonomi telah hilang. Artikel ini berargumentasi bahwa wacana tentang masyarakat adat menyeret berbagai macam kepentingan, terkhusus adalah para elit masyarakat adat itu sendiri untuk kepentingan ekonomi politiknya. Menyandarkan pada dinamika yang terjadi pada satu bagian dari masyarakat adat Teluk Bintuni, artikel ini meyakini bahwa perlahan-lahan tiang-tiang kayu besi yang menjadi pondasi solidaritas sosial mulai rapuh. Kerapuhannya tergerogoti oleh pragmatisme yang dipentaskan oleh para elit dan kemudian ditiru oleh masyarakatnya sendiri.

Kata Kunci: *Adat, Modal Sosial, Elit, Transformasi, Solidaritas Sosial, Pragmatisme*

¹Artikel ini awalnya adalah makalah yang disampaikan dalam “Pembekalan Pendamping Pra-Gelar Tikar Adat Masyarakat Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni” di Bintuni, 24-26 Oktober 2017. Dilakukan perubahan besar dan penambahan pada keseluruhan artikel. Hasil-hasil wawancara yang dimasukkan dalam artikel ini dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya Pra-Gelar Tikar Adat. Sebagian kecil artikel ini dimuat dalam esai berjudul “Tiang-Tiang Kayu Besi yang Mulai Keropos” di portal Indoprogress yang dimuat pada 6 Desember 2018. Lihat: <https://indoprogress.com/2018/12/tiang-tiang-kayu-besi-yang-mulai-keropos/> (diakses pada 23 Januari 2018).

“...Pengakuan terhadap masyarakat adat tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni sebenarnya merupakan tantangan tidak hanya kepada pihak luar (pemerintah, pengusaha, masyarakat lainnya) tetapi juga ke dalam masyarakat tujuh suku tersebut. Apakah orang-orang muda Bintuni memahami akar kebudayaannya dan menghargainya? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada meminta pihak luar mengakui keberadaan kita. Identitas itu tidak hanya soal nama tetapi juga cara hidup, etika, kepercayaan, sopan-santun, dan tatanan hukum. Apakah orang muda dan orang tua tetap mengembangkan sistem pertanian (perikanan) agar masyarakat terus hidup.”

(J. Budi Hernawan, OFM, “Menuju ke Kota (C)emas”, 2004: 12)

Pendahuluan

Bapa (Bapak) Dominikus, seorang kepala kampung dari pedalaman kawasan teluk di Kabupaten Teluk Bintuni mengungkapkan analogi simbolik yang menukik tajam. *Bapa* Dominikus mengatakan bahwa kekuatan utama rumah masyarakat adat di kampung-kampung ada pada tiang-tiang pondasi sebagai penyangga utama yang terbuat dari kayu besi. Sementara bagian atas rumah biasanya terpasang kayu-kayu putih yang ringan dan mudah rusak. Kayu besi menjadi penopang utama rumah, yang sekaligus juga menjadi kekuatan mempertahankan rumah tersebut dari kehancuran. Kayu putih bisa tergantikan kapan saja, tetapi kayu besi jika diganti berarti jatuhnya rumah tersebut².

Analogi tersebut adalah pengetahuan simbolik yang menggambarkan situasi sulit dilematis yang dihadapi *Bapa* Dominikus dan masyarakatnya di kawasan Teluk Bintuni. Wujud penetrasi kuasa merayu kehidupan masyarakat adat dari kebun hingga dapur mereka. Kehadiran investasi perusahaan dibarengi dengan dampak-dampak yang mengikutinya menggoyahkan sendi-sendi kehidupan yang ditata, dipertahankan, dan diwariskan kepada anak cucu mereka. Arus perubahan ekonomi dan sosial budaya menjadi tantangan dan persoalan yang tak terhindarkan dan mengharuskan masyarakat bersiap menghadapinya.

Analogi tajam *Bapa* kepala kampung memaparkan bahwa masyarakat adat mempunyai modal sosial budaya yang penting untuk ditegakan identitas dirinya. Modal tersebut adalah kayu besi tiang-tiang penyangga “rumah” yang membentuk karakteristik mereka sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai adat dan

kebudayaan yang kuat. Keseluruhan itu tertuang dalam narasi sekaligus aplikasi nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang tumbuh dan terwarisi di tengah masyarakat. Seiring perubahan yang terjadi, *Bapa* Dominikus melihat pondasi kehidupan masyarakat yang terwarisi dari dulu mulai goyah. Imajinasi *Bapa* Dominikus untuk menancapkan kembali “tiang-tiang kayu besi” seolah menjadi kemustahilan. “*Dong su* (mereka sudah) lupa akar,” ungkapnya.

Masyarakat adat (di kampung) pedalaman Kabupaten Teluk Bintuni sudah jauh berubah dari keadaan masyarakat di masa lalu. Kini *Bapa* Dominikus melihat hanyalah “orang-orang Papua yang tidak tahu adat”, yang hanya menggunakan adat untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia menyaksikan bahwa anak-anak di kampung hanya berpikir soal uang, tanpa berpikir perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat di kampung. Ia meyakini, situasi seperti saat ini mulai terjadi saat masuknya BP, investasi sawit, kayu, dan perusahaan lain yang menasar sumber daya alam hingga ke kampung-kampung.

Artikel ini mendiskusikan situasi perpecahan yang terjadi pada masyarakat di wilayah-wilayah investasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Situasi yang terjadi adalah gamangnya masyarakat untuk menentukan keputusan dalam menghadapi perubahan. Pada sisi lainnya, dinamika internal masyarakat sungguh sangat membingungkan. Menghadapi situasi perubahan yang luar biasa itu, masyarakat adat—berserta perpecahan di dalamnya — pada akhirnya memperkuat sentimen adat, sebagai modal sosial untuk bernegosiasi dengan pihak luar (baca: pemerintah, migran, dan investasi).

Artikel ini berargumentasi bahwa masyarakat di tanah Papua tidaklah betul-betul terisolasi dan statis. Masyarakat ini sudah sejak dahulu adalah komunitas yang dinamis dan selalu menjalin hubungan-hubungan yang tak pernah terhenti. Oleh sebab itulah, oleh Jan Pouver dan Paul Haenan, dengan menggunakan kasus

²Seperti juga dituliskan oleh Yosef Rumaseb (Papua Risk) di media sosial Facebook berjudul “APA TIANG UTAMA EKSISTENSI SUKU SEBYAR? -- GTA Dari Perspektif Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Minggu, 13 Agustus 2017).

masyarakat di kepala burung tanah Papua, mereka menyebut masyarakat Papua adalah masyarakat yang kerap bergerak, *Peoples on the Move*. Bergeraknya masyarakat pada Papua kontemporer dilanjutkan dengan mengakses kekuasaan ekonomi politik yang disediakan oleh negara dan investasi (Timmer, 2007).

Dalam pemahaman orang Papua, agar dapat terhubung dengan semua pusat ini demi mendapatkan akses modernitas, sangatlah penting untuk mempelajari bahasa-bahasa yang relevan karena melalui bahasalah pengetahuan dapat diperoleh dan dipertukarkan. Hubungan-hubungan yang penting dibentuk baik oleh perseorangan maupun kelompok sehingga terjadilah penyimpangan, perlintasan dan kaburnya batasan-batasan kelompok. Di wilayah ini dinamika migrasi sering terkait dengan peran penting dari *kain timur*, benda utama dalam pertukaran perkawinan, kompensasi dan persembahan pada roh-roh (Timmer, 2011).

Adat memiliki peran yang besar—dan kemudian “dibesarkan” sehingga menjadi romantik—namun penuh resiko dan berdampak besar. Saya menyetujui argumen Li (2010: 405) yang mengungkapkan bahwa implikasi serius dari adat adalah menjadi alat dari etno teritorialisasi, serta resiko dari manipulasi elite terhadap adat untuk tujuan politik. Artikel ini mencoba memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan lapisan-lapisan permasalahan, aktor, siasat-siasat, dan relasi mereka yang naik turun dengan pemerintah. Bagian *pertama* artikel ini dimuali dengan jelajah perdebatan argumentasi tentang relasi-relasi kuasa yang melibatkan masyarakat adat. Salah satu poin pentingnya adalah perspektif yang romantik melihat adat akan membutuhkan kita untuk melihat masyarakat adat itu homogen, eksotik, apolitis, sekaligus steril dari perubahan. Bagian *kedua* mendalami siasat “atas nama adat” dan lapisan-lapisan aktor dalam kasus yang melibatkan masyarakat adat di beberapa wilayah di Teluk Bintuni. Bagian *ketiga* memfokuskan relasi masyarakat adat dengan pemerintah yang terjadi di Teluk Bintuni. Fokus bagian ini adalah mendiskusikan pernyataan Bupati Petrus Kasihiv untuk memperkuat lembaga adat tujuh suku di Teluk Bintuni.

Saya menggunakan perspektif yang diungkapkan oleh White (2014) dalam melihat proses-proses sosial dan perubahan social yaitu *pertama*, yang melihat “jiwa” masyarakat atau

komunitas dan sumber dinamikanya terletak pada komponen-komponen perantara, modal, atau “tengah”. Sementara *kedua* menempatkan ini semua pada kelas atau kelompok ekonomi atau social “atas” dan “bawah” yang kontras (kaya/miskin, elit/rakyat) dan terutama dinamika hubungan di antara mereka. Pandangan yang pertama sangat berhubungan dengan tradisi fungsionalisme dan neo-populisme, sementara pandangan kedua lebih dikaitkan dengan ekonomi politik, analisis kelas, dan marxisme.

Bingkai utama artikel ini adalah apa yang pernah diungkapkan oleh Klinken (2015) bahwa mempelajari masyarakat Indonesia tidak selalu dari atas tetapi dari dalam jaringan-jaringan antar pribadi yang membantu memperkuat kekuasaan bersama. Jaringan-jaringan antar pribadi inilah, yang tidak terhitung banyaknya dan kemudian merambat ke seluruh penjuru kepulauan ini. Pertanyaan yang diajukan Klinken adalah bagaimana “kekuasaan” dijalankan melintasi jarak? Dengan menelusuri dinamika dan jaringan aktor serta kepentingan yang terjadi di Teluk Bintuni, artikel ini mencoba memberikan keyakinan melalui tesis utama bahwa kuasa pengetahuan yang direproduksi (juga diromantisasi) yaitu adat mentautkan dirinya dengan para aktor-aktor yang terhubung dengan investasi dan negara. Memahami kompleksitas yang terjadi di tanah Papua, salah satunya berarti adalah menelisik jejaring kuasa yang dipentaskan oleh para actor-aktor lokal dan trans-nasional, yang menebarkan jaringannya difasilitasi oleh kuasa investasi dan negara.

Romantisasi dan Kuasa

Pertama mari kita memeriksa kembali cara memandang masyarakat adat dan relasinya dengan tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Meminjam perspektif Scott (1995; Zakaria dan Lounela 2002:7) melihat negara seringkali melakukan penyederhanaan dalam mengelola dan menetapkan regulasi (aturan) terhadap tanah dan hutan. Penyederhanaan inilah yang disebut dengan oleh Scoot “simplifikasi negara” (*state simplifications*) dalam memandang heterogenitas kebudayaan dan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas hutan dan tanah. Proses penyeragaman atau membuat heterogenitas itu tidak berarti adalah sebuah usaha untuk meredam gerakan-gerakan rakyat yang dilakukan oleh negara dan berkolaborasi dengan kuasa kapital.

Sejarah relasi historis masyarakat adat dengan tanah dan hutan harus direkognisi (diakui), digali pengetahuan-pengetahuan lokal yang tersimpan di dalamnya, dan direvitalisasi dalam konteks perubahan sosial yang dialami masyarakat adat. Jika hal tersebut dilakukan maka berguna dalam kehidupan praktik masyarakat adat kekinian. Menangkap kompleksitas relasi historis tanah/hutan masyarakat adat serta transformasi sosial dengan perspektif penyederhanaan (*simplifications*) melalui pendekatan “pembangunanisme” terancam kurang menangkap “isi hati” masyarakat dan semangat perubahan sosial yang mereka inginkan.

Sangaji (2012) mengkritik “ideologi harmoni” yang tersimpan dalam definisi masyarakat adat. Ia mengungkapkan:

Masyarakat adat punya karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk pedesaan-pedalaman. Mereka hidup dalam suatu wilayah secara turun-temurun dan terus-menerus, dengan sistem kebudayaan dan aturan-aturan adat khas yang mengikat hubungan sosial di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya.” (Rachman, 2012).

Pandangan ini mewakili pandangan dominan yang melihat masyarakat adat semata dari segi identitas, dan sering kali romantis. Pandangan ini mengisolasi masyarakat adat dari aspek kegiatan produksi mereka yang jauh lebih kompleks. Li dkk (2011) menunjukkan empat faktor kuasa yang mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara: (1) Regulasi, terutama berhubungan dengan aneka peraturan sah dari negara; (2) Pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor non-negara; (3) Pasar, yang membatasi akses ke tanah lewat mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) Legitimasi, yakni aneka bentuk justifikasi moral, seperti klaim hak turun-temurun, pertimbangan ilmiah, rasionalitas ekonomi, dan klaim pemerintah untuk mengatur. Keempat aspek kuasa itu tepat menggambarkan kenyataan masyarakat adat disingkirkan dari tanah mereka, terutama melalui negara dan korporasi berbasis pengerukan sumber daya alam (Sangaji, 2012).

Istilah adat mengandung banyak arti yang kemudian diambil dan digunakan untuk berbagai tujuan. Meski berbagai pihak berwenang percaya bahwa mereka mengetahui apa yang dimaksudkan dengan adat. Beragam pemahaman dan penafsiran atas istilah ini justru

membuat adat menjadi sulit untuk dikontrol. Mengungkapkan suatu adat berarti mengklaim kemurnian atau keaslian demi kepentingan kelompok. Adat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah yang sesungguhnya adalah esensi adat dari masyarakat Indonesia.

Secara paradoks, adat juga membentuk sebuah arena intervensi karena adat dianggap sebagai sesuatu yang rapuh, kekurangan, atau sedang merosot. Sehingga adat membutuhkan perlindungan, pengokohan, dan pemulihan. Adat berbagi ciri-ciri tersebut dengan komunitas yang bagaimanapun juga membutuhkan campur tangan dan perbaikan guna membuatnya sempurna. Perspektif seperti ini pada ujungnya akan mengungtungkan lapisan elit dari adat. Persoalan berikutnya sudah jelas berhubungan dengan soal representasi, ketika para elit merasa berhak untuk mewakili keseluruhan (masyarakat adat).

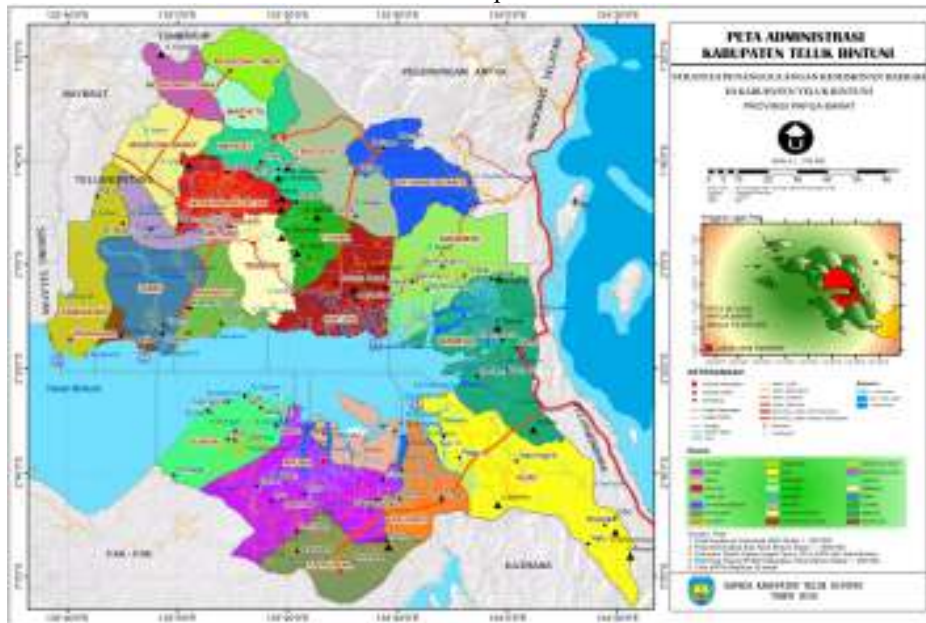
Ciri-ciri dari istilah adat ini membuatnya dapat digunakan untuk berbagai proyek yang bersifat politis. Adat, yang digunakan dalam menjalankan peraturan, merupakan sesuatu yang dikonsepsikan secara hirarkis tetapi masih tetap bersifat demokratis. Alasannya karena ia muncul dari tengah masyarakat; bersifat disiplinern namun mendorong keselarasan. Pada sisi lain dari *spectrum* ini merupakan upaya-upaya untuk menantang otoritas Negara atas nama hak-hak rakyat serta kemampuan untuk mengelola pemerintahan sendiri dan keadilan sosial. Tema sentral terhadap agenda oposisional adalah usaha menuntut kembali hak-hak adat atas tanah yang diambil dan dimanfaatkan oleh rezim kolonial beserta rezim penggantinya. Satu agenda promosi dan pemulihan adat dapat masuk secara mulus atau mengalami pembalikan oleh pihak lain, hanya dengan menggunakan istilah kunci seperti kedaulatan, dan otonomi (Li, 2010: 367-368).

Oleh karena itulah, bagi saya, jauh lebih penting untuk melihat dinamika masyarakat adat lebih dari sekadar “ideologi harmoni” atau “politik perbedaan/identitas”. Hal itu adalah terciptanya relasi produksi dan pembentukan para elit adat lokal yang mengakumulasi basis ekonomi politik. Program-program pembangunan datang dan pergi silih berganti masuk ke pedalaman, namun mereka abai pada relasi kuasa. Justru yang terjadi adalah terbentuknya para elit lokal (oligarki lokal) yang terus mengkonsolidasi basis-basis ekonomi politik (Darmanto, 2015: 116). Ini adalah dampak yang

ditimbulkan dari relasi kelas-kelas produksi pada masyarakat adat yang tercipta akibat hadirnya pembangunan dan modernitas di kampung-kampung Papua. Esensinya, masyarakat adat itu

tidak tunggal tapi plural (beragam). Kompleksitas kelas dalam masyarakat adat menandai terbangunnya jaringan produksi dan kuasa memperebutkan modal ekonomi politik.

Gambar 1
Peta administratif Kabupaten Teluk Bintuni



Sumber: Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni 2016

Widjojo (2001; 2009) telah menengarai bahwa kekerasan dan konflik akan berlangsung tanpa ujung di tanah Papua. Lingkaran kekerasan itu merujuk kepada begitu banyak aktor dengan berbagai kepentingan. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), institusi penelitian milik negara, telah mengidentifikasi setidaknya ada 4 kompleksitas persoalan yang hingga saat ini masih terjadi di Tanah Papua. *Pertama*, marginalisasi orang asli Papua, terutama dalam hak ekonomi sebagai efek migrasi penduduk. *Kedua*, kegagalan program pembangunan di Papua untuk mengatasi marginalisasi ekonomi. *Ketiga*, perbedaan pemahaman mendasar terhadap sejarah antara Jakarta dan Papua. *Keempat*, kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Papua. Pada sisi yang lain, dalam dinamika di internal masyarakat Papua, cita-cita sebuah “Papua Baru” yang dituliskan oleh Giay (2000) sebagai respon dari tragedi kekerasan dan penjajahan (gaya baru) yang dilakukan negara adalah tawaran yang diajukan sejak awal. “Papua Baru” yang dibayangkan adalah emansipasi rakyat Papua yang berdaulat dan bermartabat untuk menentukan arah Papua ke depannya.

Lapisan Aktor

Momentum penting kehadiran BP LNG Tangguh adalah pada tahun 2005 ketika penduduk Kampung Tanah Merah direlokasi karena lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan proyek pengembangan BP LNG Tangguh. BP LNG Tangguh membeli tanah dari marga Simuna di sekitar muara Sungai Saengga untuk memukimkan kembali penduduk asal Tanah Merah. Kawasan relokasi ini kemudian dikenal dengan nama Kampung Tanah Merah Baru. Untuk kepentingan tersebut BP LNG Tangguh membebaskan tanah seluas 32 ha di Onar untuk memindahkan penduduk asal Tanah Merah. BP LNG Tangguh membangun 29 unit rumah di Onar yang kemudian dikenal dengan nama Onar Baru. Menghindari kecemburuan sosial penduduk Saengga terhadap perlakuan penduduk Tanah Merah Baru yang dibangun rumah baru dengan fasilitas lengkap, BP LNG Tangguh juga merenovasi rumah-rumah penduduk Saengga sama persis seperti rumah penduduk Tanah Merah yang di relokasi ke Tanah Merah Baru. Dengan demikian terdapat 3 kelompok pemukiman yang dibangun oleh BP LNG tangguh yaitu Tanah Merah Baru, Onar Baru dan Saengga.

Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Teluk Bintuni menetapkan lokasi tempat LNG Tangguh dan sekitarnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pengembangan seimbang antara wilayah Utara dan Selatan. Berdasarkan SK Bupati Teluk Bintuni No. 76/01/BUP-TB/V/2013, Kampung Onar Distrik Sumuri ditetapkan sebagai lokasi pendirian pabrik petrokimia dengan investor utama Ferrostaal GmbH, Jerman. Untuk mendukung proyek ini akan ada pengerahan tenaga kerja sebanyak 3000 orang baik karyawan langsung dan tidak langsung. Hal ini berarti ke depan akan terjadi gelombang migrasi yang cukup besar ke Distrik Sumuri.³

Kehadiran investai BP di Kabupaten Teluk Bintuni menghadirkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi. Salah satu permasalahan yang tersimpan bagai api dalam sekam tersebut adalah fragmentasi (baca: perpecahan) di tengah masyarakat. Keseluruhannya berhubungan dengan kehadiran BP Tangguh dengan rentetan permasalahan yang menyebabkan masyarakat merasa disingkirkan dalam arus besar perubahan. Kompleksitas permasalahan hadir silih berganti bagai benang kusut yang saling mempengaruhi. Penggantian uang ganti rugi tanah yang tidak adil dan masyarakat lokal merasa ditipu, pembangunan fasilitas masyarakat yang tidak memuaskan masyarakat, hingga kepada keterlibatan masyarakat lokal dalam keberlangsungan perusahaan. Semuanya menumpuk menjadi permasalahan yang berlapis-lapis dan saling berkaitan.

Tumpukan permasalahan yang masih belum terselesaikan di kampung-kampung menunggu untuk mencari pangung sebelum meledak ke permukaan. Berbagai isu-isu kecil bisa menjadi arena untuk mengekspresikan konflik atau bahkan menjadi akar dari konflik baru yang melibatkan pihak baru juga. Beberapa kelompok masyarakat sebelumnya menjadi bagian dari perusahaan, namun kemudian keluar dan kembali berada di pihak masyarakat. Posisi yang terus berubah-ubah sesuai dengan kepentingan pada saat konflik berlangsung.

³Bagian yang menjelaskan tentang kronologis masuknya investasi di Distrik Sumuri ini dikutip seluruhnya dari draft laporan “Pemetaan Sosial Masyarakat Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni”, LPM UI 2014.

Salah satu contohnya adalah konflik mengenai bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat terdampak di Suku Sebyar, Bintuni. Perusahaan BP Tangguh bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni berencana untuk memberikan bantuan rumah sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah adat Sebyar. Namun justru tercipta konflik di tengah masyarakat antara yang menerima program sosial tersebut dan yang menolaknya. Beberapa kelompok di tengah masyarakat menuntut untuk penghentian program bantuan sosial rumah tersebut. Alasan mendasarnya adalah ketidakpercayaan karena serangkaian penipuan yang dilakukan oleh perusahaan bersama dengan Pemda terhadap masyarakat. Tumpukan permasalahan sebelumnya kembali mengemuka dan menjadi alasan untuk konflik kembali terjadi.

Kondisi ini menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menginginkan bantuan sosial tersebut tetap berlangsung, tapi di sisi lain ada juga yang dengan tegas menolaknya. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok di tengah masyarakat yang lahir dari berbagai kepentingan. Para elit masyarakat berperan penting dalam menggerakkan konflik dan bermanuver yang memunculkan rasa saling mecurigai antara satu dengan lainnya. Akibat kondisi tersebut munculnya ketidakpercayaan dan rusaknya hubungan sosial kekerabatan di tengah masyarakat. Konflik dan kekerasan kini bukan hanya yang melibatkan pemerintah atau perusahaan dengan masyarakat, lebih lanjut konflik muncul pada skala mikro (kecil) yaitu antar masyarakat dilatarbelakngi berbagai kepentingan.

Suku Sebyar merupakan salah satu dari tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Mereka memiliki sejarah yang panjang akibat konflik dengan BP Indonesia yang berhubungan dengan berbagai macam masalah—ganti rugi tanah, pembangunan infrastruktur, ketidakpuasan akibat kehidupan yang tak kunjung maju dan yang lainnya. Sejarah panjang konflik tersebut mengakibatkan mereka sangat berhati-hati dan cenderung reaktif dalam merespon program-program bantuan atau pembangunan dari perusahaan maupun dari pemerintah.

Program bantuan rumah sosial di Distrik Weriagar —yang merupakan wilayah Suku Sebyar— dari BP Indonesia dan Pemda

Kabupaten Teluk Bintuni telah memicu konflik berkepanjangan. Terdapat tiga kelompok di tengah masyarakat Sebyar yaitu para kepala kampung di wilayah Suku Sebyar yang mendukung pelaksanaan pembangunan rumah sosial tersebut. Para kepala kampung ini beranggapan bahwa rumah sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah lama mengidam-idamkannya. Masyarakat di kampung-kampung sudah lama menunggu pembangunan rumah sosial tersebut sebagai komitmen BP Indonesia dan juga Pemda Kabupaten Teluk Bintuni.

Seorang kepala kampung mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak mengerti permasalahan dan konflik hanya bisa menunggu bantuan rumah tersebut. “Masyarakat masih menunggu pembangunan rumah sosial tersebut sampai Desember 2017 mulai berjalan. Kalau tidak nanti akan ada konflik di tengah masyarakat,” ungkapnya. Para kepala kampung ini mendengar dari aspirasi masyarakatnya tentang kecurigaan terhadap warga masyarakat yang “bermain kebutuhan masyarakat” untuk kepentingan pribadi mereka. Orang-orang ini adalah orang yang menjual kepentingan masyarakat atau bahkan mempermainkan kepentingan masyarakat agar mendapatkan keuntungan sendiri. Konteks yang dimaksud oleh kepala kampung ini adalah dalam rencana pembangunan rumah sosial di Suku Sebyar di Distrik Weriagar.

Kecurigaan itu semakin nampak saat pembicaraan di tengah masyarakat ketika muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab atau yang akan melanjutkan jika terdapat penolakan pembangunan rumah sosial. Jika penolakan terhadap rumah sosial tersebut berhasil, apakah terdapat jaminan “barang” tersebut akan tetap berjalan pembangunannya? Mendengar pertanyaan tersebut, tidak banyak warga yang memberikan jawaban kepastian. “Tidak ada yang bersuara,” ujar sang kepala kampung. Sang kepala kampung mengungkapkan bahwa keinginan untuk memiliki rumah sudah menjadi tekad masyarakat. Bahkan selama ini, khususnya *mama-mama* sangat menyesalkan para laki-laki yang tidak mau berusaha untuk membuat rumah mandiri. *Mama-mama* inilah yang menjahit atap rumah sederhana mereka. Sementara laki-laki hanya bisa menuntut dan diam saja tidak mau berusaha untuk membuat rumah sendiri. Akibat dari ulah ini adalah masyarakat yang menjadi korbannya.

Kelompok *kedua* adalah sebuah lembaga masyarakat yang pembentukannya difasilitasi oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LP3BH di Manokwari. Lembaga ini berusaha untuk mewadahi berbagai kepentingan masyarakat Suku Sebyar. Nama lembaga ini adalah BP3LMAS. Para pengurus dan anggota dari lembaga ini adalah para elit kampung yang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Teluk Bintuni, anak-anak muda yang sempat mengenyam pendidikan tinggi, serta beberapa diantaranya sempat bekerja di berbagai perusahaan yang ada di Teluk Bintuni. Beberapa anggota dari lembaga ini sangat keras untuk memprotes pembangunan rumah sosial dari BP Indonesia dan Pemda Teluk Bintuni. Mereka juga sangat kritis dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh BP Indonesia dan Pemda.

Kelompok *ketiga* adalah LMA (Lembaga Masyarakat Adat) yang baru terbentuk beranggotakan para elit adat dan masyarakat Suku Sebyar. Posisinya kelompok ini tidak begitu jelas dan belum terlihat. Mereka seringkali masih membaca situasi dan mengikuti kepentingan yang menguntungkan mereka. Posisi ini mereka ambil karena terjepit dengan berbagai kepentingan yaitu menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah—karena mereka dibentuk dan didanai pemerintah—tapi juga di sisi lain berkeinginan untuk bersuara kritis terhadap perusahaan. Dari semua aktor tersebut menimbulkan berbagai kepentingan yang mereka ingin perjuangkan. Berbagai manuver atau “gerakan-gerakan tambahan” mewarnai berbagai aksi-aksi untuk mengkritisi kebijakan BP Indonesia dan Pemda Teluk Bintuni.

Salah satu kelemahan penting dari kontestasi berbagai kepentingan tersebut adalah substansi permasalahan yang harus diatasi akhirnya belum tersentuh. Perdebatan dan konflik hanya menyentuh persoalan artifisial (praktis), bukannya yang mendasar. Para elit memanfaatkan kesempatan berkonflik tersebut untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Sebagian besar memandang pragmatis untuk kepentingan sesaat seperti meraih keuntungan ekonomi dan politik dari kehadiran perusahaan di wilayah mereka. Dari konflik-konflik yang melibatkan para elit di kampung telah menjadikan masyarakat biasa di kampung-kampung yang mengharapakan perubahan dalam hidupnya sebagai korban.

Seorang kepala kampung dari Suku Sebyar mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengisahkan bahwa masyarakat di kampung telah lama menunggu terlaksananya pembangunan rumah sosial. Namun penantian mereka telah lama tidak terjawab. Hal tersebut menimbulkan kebingungan di kampungnya. Terlalu banyak orang-orang yang datang dengan kepentingannya masing-masing. Orang-orang ini datang ke kampung dan membuat isu-isu yang meresahkan masyarakat. Akhirnya situasi di kampung menjadi resah dengan banyaknya isu-isu tersebut. Kepala kampung ini menuturkan:

Kita dengan kita baku hantam (saling berkelahi). Kitong akhirnya jadi bingung mana yang akan dipercaya. Kitong mau dengar siapa? Pemerintah kah atau lembaga-lembaga ini? Lembaga ini kan dibawah pemerintah?

Keinginan masyarakat adalah mendapatkan perumahan sosial dari perusahaan (BP Indonesia) dan Pemda Bintuni. Kondisi mereka di kampung saat ini dari segi perumahan sungguh sangat memprihatinkan. Selama ini juga yang mengerjakan rumah adalah mama-mama di kampung. Sementara para laki-lakinya sibuk untuk mengurus tuntutan ke BP LNG berhari-hari di kota. Situasi semakin rumit karena sikap BP3LMAS terkesan memaksa masyarakat untuk menolak bantuan rumah sosial dan menuntut uang ganti rugi yang belum dibayarkan sebagai ganti rugi tanah mereka yang digunakan oleh perusahaan. Jika belum melunasi ganti rugi tersebut maka seluruh program-program bantuan dari perusahaan BP Indonesia akan ditolak. Tuntutan itulah yang dilaporkan ke Bupati Teluk Bintuni, sehingga menyebabkan Bupati dan Gubernur Papua Barat membuat surat untuk menghentikan semua program bantuan sosial dari perusahaan kepada masyarakat.

Keputusan tersebut membuat situasi semakin kompleks dan semakin menegaskan pula bahwa banyak lapisan aktor-aktor yang ada di tengah masyarakat. Lembaga-lembaga yang hadir di tengah masyarakat juga mempunyai kepentingannya sendiri, sesuai dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Sang kepala kampung mengungkapkan bahwa semua orang-orang dengan lembaga dan kekuasaannya masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Lembaga (BP3LMAS) tidak berkoordinasi dengan pemerintahan kampung, begitu juga dengan LMA.

Pada suatu kesempatan kepala-kepala kampung melihat kondisi yang meresahkan di tengah masyarakat dan berinisiatif untuk bertemu dengan Bupati Teluk Bintuni. Mereka menyampaikan keinginannya untuk secepatnya mendapatkan rumah-rumah bantuan sosial di kampung-kampung. Ini suara yang ada di kampung.

Masyarakat ingin dapat rumah. Mereka ingin punya rumah yang layak, terutama mama-mama yang sering menjahit atap demi memiliki rumah di kampung, bukannya laki-laki. Mereka ini yang berkeinginan keras untuk mendapatkan rumah sosial di kampung.

Para kepala kampung menyadari bahwa ada berbagai kepentingan yang melibatkan perusahaan—dalam hal ini BP Indonesia—yang bekerjasama dengan Pemda Teluk Bintuni. Kerjasama mereka ini yang menjadi kesempatan kepada orang-orang yang bermain dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Berbagai jenis program dan bantuan direncanakan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itulah, kepala kampung menyebutkannya dengan istilah “bermain di kebutuhan masyarakat”.

Masing-masing kelompok dengan aktornya mempunyai arah pembicaraan yang terus-menerus diulang. Keseluruhan pembicaraan tersebut jika ditarik benang merahnya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut lebih merupakan representasi dari para aktornya dengan menggandeng institusi di dalamnya. Salah satu contohnya adalah tujuan untuk terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) untuk bisa bebas mengurus diri sendiri. Penggeraknya adalah pejabat Pemda Teluk Bintuni yang dalam setiap kesempatan selalu menyisipkan semangat dan harapan untuk terbentuknya kabupaten baru yang terpisah dari Teluk Bintuni. Bahkan dalam forum-forum resmi di hadapan berbagai pihak, perjuangan terbentuknya kabupaten baru tersebut terus dinyatakan dengan bersemangat.

Wacana tentang perjuangan terbentuknya kabupaten baru terpisah dari Kabupaten Teluk Bintuni kadang ditanggapi senyum sinis oleh sebagian warga Teluk Bintuni sendiri. Saat para tokohnya berbicara tentang mimpi kehadiran kabupaten baru terus-menerus terucap di forum, beberapa warga terlihat tersenyum dan berujar,

“*Pace, ko stop tipu sudah*” (suasana saat pertemuan tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni). Di sela-sela tuntutan perhatian perusahaan, khususnya BP Indonesia terhadap

masyarakat tujuh suku, terselip cita-cita untuk mewujudkan kabupaten baru agar masyarakat lebih sejahtera di kemudian hari.

Gambar 2

Rencana Gelar Tikar Adat tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni untuk membahas seluruh persoalan masyarakat adat



Sumber: Dokumen pribadi penulis

Atas Nama Adat

Salah satu kekuatan penting di tengah masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni adalah kepala kampung. Mereka inilah yang menjadi pelaksana pemerintahan di tingkat yang paling dasar. Meski posisinya terpisah dari tatanan masyarakat adat, kepala kampung menjadi salah satu pondasi penting yang secara langsung juga mempengaruhi masyarakat adat di kampung tersebut. Oleh karena itulah posisi kepala kampung menjadi sangat strategis untuk memainkan peran sebagai salah satu aktor penting terjadinya perubahan sosial.

Seorang kepala kampung Suku Sebyar mengungkapkan bahwa berbagai kepentingan dari orang-orang di tengah masyarakat menasar untuk “pelemahan” peran kepala kampung. Pengaruh kepala kampung di tengah masyarakat mencoba untuk diambil alih oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Orang-orang ini adalah juga masyarakat lokal yang sudah diketahui tujuan dan gerakangerakannya. Kondisi di lapangan adalah terjadinya perpecahan di internal kampung-kampung yang berada di kawasan BP LNG

Tangguh. Ada kelompok kepala kampung yang pragmatis dengan mengikuti arus berbagai kepentingan yang masuk ke kampung. Pada sisi lainnya ada kepala kampung yang mencoba kritis dan jernih untuk membaca dinamika dan perpecahan yang terjadi pada masyarakatnya.

Tebang kepala kampung, ada massa besar di belakangnya. Begitu yang sering saya dengar dari masyarakat. Mereka mendengar dari orang-orang yang datang ke kampung dan membuat perpecahan di tengah masyarakat

Pondasi kehidupan masyarakat yang ada di kampung-kampung Kabupaten Teluk Bintuni itu sebenarnya sederhana. Simbol-simbolnya bisa terlihat di tengah kehidupan sehari-hari. Salah seorang kepala kampung Suku Sebyar ini menganalogikan suatu yang menarik tentang rumah-rumah masyarakat di kampung.

Rumah-rumah masyarakat Suku Sebyar di Weriagar itu di bawah rumahnya berasal dari kayu-kayu besi yang kuat. Tapi kalau kitong lihat atapnya itu dari kayu putih. Jadi jangan coba-coba tebang kayu besinya di bawah. Rumah akan hancur.

Filosofi itu menggambarkan bahwa kekuatan masyarakat di kampung-kampung itu harus ditemukan, digali, dan diperbaharui untuk menanggapi perubahan zaman. Sang kepala kampung melihat situasi yang terjadi sekarang adalah menuju kehancuran. Melihat orang-orang Sebyar kini selalu menuntut dan memperebutkan uang tanpa mau memperbaiki diri. Ia melihat hilangnya kepercayaan dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian, orientasi mereka adalah bahwa ada sumber uang (perusahaan yang ada di wilayah mereka) yang harus dikuras terus-menerus dengan serangkaian tuntutan. Padahal, perusahaan dan pihak luar bisa datang silih berganti sesuai dengan kepentingan mereka. Justru orang Sebyar sendirilah yang harus menata dirinya dengan baik untuk kelangsungan generasi mereka selanjutnya.

Sang kepala kampung mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi selama ini jika dianalogikan seperti istilahnya adalah “kayu-kayu putih” yang menjadi atap saja, bukan pondasinya. Semua tuntutan dan kepentingan aktor-aktor yang bermain di wilayah Teluk Bintuni secara keseluruhan menurutnya masih seputar persoalan “kayu-kayu putih”—tuntutan pragmatis yang akan bisa habis dan hilang. Sang kepala kampung mengharapkan untuk memperhatikan identitas dan budaya yang kokoh bagi orang Sebyar di Teluk Bintuni secara khusus. Hal tersebut berhubungan dengan keinginan dan kemampuan berefleksi serta menempatkan diri di tengah perubahan.

Tuntutan pragmatis yang paling utama dari aktor-aktor yang berkepentingan di wilayah Suku Sebyar tersebut adalah seputar permasalahan uang. Tuntutan pekerjaan, ganti rugi tanah, bantuan sosial perumahan, dan yang lainnya berpusar di permasalahan keuangan dan ketidakpuasan akibat perilaku perusahaan dan pemerintah terhadap masyarakat lokal. Kehadiran perusahaan dan pemerintah hanya dilihat sebatas masalah uang yang harus dibagikan kepada masyarakat, tidak lebih dari itu. Sang kepala kampung justru melihat ada persoalan besar yang dilupakan selama ini oleh orang Sebyar yaitu identitas diri dan budaya. Persoalan identitas diri dan budaya di tengah perubahan Teluk Bintuni yang melaju kencang. Persoalan tersebut bukan hanya masalah adat semata, tetapi keseluruhan cara orang Sebyar khususnya untuk bersikap menghadapi perubahan.

Kekhawatiran sang kepala kampung sangat beralasan. Masyarakat Sebyar terkenal sangat dinamis dan paling vokal dalam menanggapi tuntutan-tuntutan, terutama terhadap perusahaan BP Indonesia. Cikal-bakalnya sudah tentu rentetan *baku tipu* (saling menipu) yang mereka alami sejak dari awal hadirnya BP Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain di wilayah mereka. Kondisi tersebut memicu endapan persoalan yang tidak kunjung selesai. Dampaknya meluas kepada kehidupan masyarakat yang terpaksa dan berharap datangnya uang dengan mudah hanya dengan menuntut.

Seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat rusak akibat kondisi ini. Salah satunya adalah lembaga adat, yang seharusnya menjadi salah satu pondasi “kayu-kayu besi” tersebut. Sang kepala kampung yang juga menjadi salah satu tokoh adat menyebutkan kondisi masyarakat adat di kampungnya sangatlah memprihatinkan. Ia mengungkapkan:

Masyarakat dong saling tidak percaya dengan dong pu pemimpin sendiri. Dong su hilang kepercayaan. Dong jual masyarakat jadi.

Kepemimpinan adat mendapatkan guncangan karena aktor-aktor yang berada di dalamnya menjadikan adat hanya alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. “*Dong jual adat saja,*” begitu masyarakat sering mengungkap sinis terhadap perilaku para elit yang sering mengatasnamakan adat untuk menuntut berbagai macam kebutuhan kepada perusahaan atau pemerintah. Sebagian masyarakat tidak pernah mengenal para elit tersebut sebagai tokoh adat. Para elit tersebut bukan tinggal di kampung tetapi di daerah kota/kabupaten dan tidak mempunyai akar kepercayaan di tengah masyarakat kampung. Justru di kota mereka berteriak lantang berbicara atas nama adat di kampung.

Seorang tokoh muda Sebyar, Adolof, yang mengenyam pendidikan tingkat sarjana di Jayapura mengungkapkan kekhawatirannya melihat para tokoh adat di kampung yang sudah keluar dari jalur nilai-nilai adat dan mementingkan diri sendiri. Kepemimpinan adat terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingannya. Terjadi penurunan wibawa dan pengaruh pemimpin adat di kampung. Tidak ada tokoh adat yang mampu mempersatukan berbagai kelompok marga-marga dengan kepentingannya masing-masing.

Dampaknya adalah antara masyarakat ada saling curiga dan tidak percaya satu dengan yang lain. Situasi ini berbahaya untuk persatuan masyarakat di kampung.

Ia mengandaikan bahwa para tokoh adat tersebut telah menjual masyarakatnya sendiri kepada perusahaan untuk memperkaya dirinya sendiri. Perhatian untuk menjaga adat dan budaya sebagai dasar bersikap di tengah arus perubahan yang hadir hingga ke kampung telah sirna. Akhirnya, generasi selanjutnya meniru perilaku para orang tua mereka dan tidak menghiraukan nilai-nilai adat dan budaya sebagai identitas yang penting. Perilaku para orang tua ini tidak berwibawa di mata masyarakat, terutama generasi mudanya. Para elit kehilangan wibawa di depan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa para elit inilah yang memanfaatkan celah kepemimpinan adat yang rapuh untuk memperoleh keuntungan.

Kekuasaan kepala kampung atau kepemimpinan adat sebenarnya berada di marga-marga dengan status kepemilikan hak-hak ulayat atas tanah. Jaringan berikutnya adalah kekerabatan dan perkawinan yang membuat mereka terikat satu dengan yang lain dalam persaudaraan. Simpul-simpul inilah yang mengikat jaringan kekerabatan di kampung-kampung. Maka tidaklah heran jika pemekaran-pemekaran kampung berdasarkan marga-marga menjadi salah satu fenomena untuk bersiasat meraih bantuan dari pemerintah maupun perusahaan, disamping untuk menjaga hak-hak atas tanah.

Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki wilayah yang menjadi lokasi dari investasi berbagai perusahaan besar. Salah satunya adalah BP Indonesia. Kondisi ini juga menjadi faktor penting dari agresif serta kritisnya masyarakat terhadap tipu daya dari perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam mereka. Situasi di Suku Sebyar sangat berbeda dengan yang terjadi di daerah-daerah lain. Seperti misalnya yang terjadi di Suku Kuri, salah satu dari tujuh suku di Kabupaten Teluk Bintuni yang sebagian besar berada di wilayah pedalaman kawasan teluk. Sumber daya alam yang menjadi incaran investasi adalah kayu yang terbentang dari luasnya hutan yang merupakan hak ulayat mereka.

Suku Kuri berada di tiga wilayah kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Teluk Bintuni sendiri, Kabupaten

Kaimana, dan Kabupaten Teluk Wondama. Persebaran suku ini di setiap kabupaten juga terpisah yaitu yang berada di wilayah pegunungan dan berada di pantai. Di setiap kawasan terdapat persebaran orang Kuri di wilayah Kuri gunung dan Kuri pantai. Namun, seiring dengan perkembangan migrasi suku, di setiap wilayah terdapat orang Kuri di pedalaman maupun di pesisir pantai.

Persebaran Suku Kuri di Kabupaten Kaimana adalah di wilayah Teluk Arguni yang sekarang menjadi dua wilayah distrik yaitu Teluk Arguni Atas dan Teluk Arguni Bawah. Orang Kuri tersebar di perkampungan di pesisir Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana. Di Kabupaten Teluk Wondama mereka menempati wilayah pesisir Ambumi hingga ke wilayah pedalaman Naikere misalnya. Dan tentu saja masih banyak persebaran lainnya. Persebaran mereka sebenarnya melintasi tiga kabupaten ini awalnya. Hadirnya tiga kabupaten baru ini sebagai wilayah administratif pemerintah membuat mereka terpecah-pecah mengikuti pembagian tiga kabupaten ini.

Orang-orang Kuri yang berada di kawasan pesisir Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Persebaran marga-marga saling keterkaitan satu sama lainnya karena hubungan perkawinan. Marga-marga besar seperti Warfete dan Revideso misalnya adalah marga-marga yang berasal dari pedalaman Bintuni dan juga Kaimana yang kemudian bermigrasi (berpindah) ke daerah pesisir dan membuat kampung sendiri. Marga-marga lain kemudian mengikutinya untuk melakukan perjalanan mencari sumber-sumber penghidupan di daerah pesisir yang memungkinkan mereka untuk dekat dengan laut dan membangun kontak dengan suku lainnya. Sementara orang-orang Kuri yang berada di Teluk Bintuni tetap berada di wilayah pegunungan dan sebagian sudah bermigrasi ke daerah-daerah pesisir Teluk Bintuni untuk memudahkan mereka menjangkau Kota Bintuni.

Distrik Kuri di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari tujuh kampung yaitu: Kampung Sarbe yang merupakan ibukota distrik, Wagura, Naramasa, Obo, Revideso, Awegro, dan Otremta. Terdapat 12 marga orang Kuri yaitu: Revideso, Ariensawa, Warfete, urbon, yanmina, Figo, Troba, Efredire, Furier, Tatuta, dan Yoweni. Mereka memiliki kepercayaan bahwa

asal-muasal suku-suku lainnya adalah pada legenda *Kuri Pasai* yang menjadi kepercayaan orang Kuri. Mitologinya adalah tentang perjalanan manusia bernama *Kuri Pasai* dari mulai matahari terbit hingga tenggelam.

Kepala Suku Kuri di Kabupaten Teluk Bintuni mengungkapkan hingga kini mereka selalu menjaga hubungan kekerabatan dengan orang-orang Kuri yang berada di Kabupaten Kaimana dan Teluk Wondama. Namun jika berhubungan dengan kewenangan hak ulayat, itu sudah diatur masing-masing marga dengan wilayahnya sendiri. Begitu juga dengan pemilihan kepala Suku Kuri di masing-masing kabupaten. Seluruhnya diserahkan di masing-masing marga Kuri untuk melakukan pemilihan.

Suku Kuri di Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pemilihan kepala suku dengan mengumpulkan 12 marga yang ada. Seluruhnya kemudian berunding dan melakukan gelar ritual adat untuk membicarakan siapa yang pantas untuk menduduki kepala suku. Dasar kekuatan pemilihannya adalah pada marga-marga yang mempunyai tetua adat masing-masing. Kemunculan kepala suku ini juga ada atas desakan dari Pemda Teluk Bintuni agar tujuh

suku mempunyai kepala suku masing-masing. Pemda Teluk Bintuni memfasilitasi seluruh proses pendirian lembaga adat dan pemilihan kepala suku tersebut.

Kebijakan pemerintah yang berinisiatif membuat lembaga adat dan memilih kepala suku sangat bermasalah karena akan memicu konflik di tengah masyarakat. Pemilihan kepala suku dari perundingan masing-masing marga belum tentu berlangsung dengan mulus. Basis kekuasaan paling dasar berada di tingkat marga. Persaingan antar marga dalam memperebutkan jabatan kepala suku inilah yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan. Jabatan kepala suku dianggap jabatan strategis yang sebenarnya berawal dari keinginan Pemerintah Belanda untuk mendapatkan orang di kampung untuk memastikan berjalannya pemerintahan. Jabatan ini kemudian menjadi tumpang tindih dengan kepala kampung yang hadir belakangan. Tidak jarang para kepala kampung inilah yang kemudian dianggap sebagai kepala suku. Padahal yang lebih berperan dan berakar adalah para kepala marga, yang dipilih berdasarkan garis keturunan tertua dan kemampuan dalam bidang adat dan budaya.

Gambar 3

Rapat Pleno Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay yang juga membawahi Dewan Adat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni



Sumber: Dokumen pribadi penulis

Pemerintah “Merangkul”

Kebijakan pemerintah untuk penguatan kelembagaan adat dan pemilihan kepala suku dari tujuh suku yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan keinginan untuk merangkul elemen adat. Tujuannya adalah untuk menjalin

kebersamaan bersama dengan pemerintah dan agama dalam melaksanakan program pembangunan. Tujuan yang agak samar-samar diterjemahkan itu disampaikan oleh Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihw dalam acara konsultasi publik peraturan daerah perlindungan masyarakat

hukum adat di Teluk Bintuni akhir Agustus 2017. Petrus Kasihw mengungkapkan:

Masyarakat tujuh suku di Bintuni ini mempunyai kearifan lokal masing-masing suku. Dinamika yang terjadi selama ini itu yang perlu disatukan. Tiga komponen penting di Teluk Bintuni ini harus bersatu yaitu pemerintah, adat, dan agama. Adat dan keberagaman budaya tujuh suku adalah potensi yang besar untuk pembangunan. Oleh karena itulah menurut saya kebersamaan masyarakat tujuh suku sangat penting.

Dinamika yang dimaksudkan oleh Petrus Kasihw adalah gejala yang terjadi terutama pada Suku Sebyar dan Suku Sumuri dimana lokasi-lokasi perusahaan besar seperti BP Indonesia, Genting Oil, dan perusahaan kayu atau sawit beroperasi. Gejala tersebut menyangkut keadilan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Akumulasi permasalahan berupa ganti rugi hak ulayat, perumahan, serta perekrutan tenaga kerja melahirkan konflik berkepanjangan yang tak berujung pangkal. Konflik lama menjadi alasan tambahan untuk kelahiran konflik baru. Konflik baru “diadakan” untuk tujuan menggugat dasar konflik lama. Spiral konflik yang memutar dan menjadi kronis karena cerita konflik turun-temurun dan juga melahirkan aktor-aktor baru.

Pemerintah berusaha untuk mencermati persoalan tersebut dan melihat bahwa lembaga-lembaga adat di tujuh suku belum terlalu solid untuk menghadapi konflik. Banyak perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat karena berbagai kepentingan. Lembaga-lembaga adat juga tidak berjalan dengan baik dengan tugas dan tanggung jawabnya. Solidaritas dan kekuatan di internal masyarakat adat patut dipertanyakan karena begitu banyaknya berbagai kepentingan dengan menawarkan uang dan kemudahan. Perspektif pemerintah terhadap masyarakat ini menunjukkan ketidakpercayaan dan kebingungan dalam memandang aktor-aktor yang bisa dipercaya dan disegani di tengah masyarakat. Semuanya terpecah belah dan tidak ada yang bisa dipercaya.

Petrus Kasihw melihat bahwa satu-satunya cara untuk merangkul masyarakat adat ini adalah dengan cara memperkuat kelembagaan adat. Oleh karena itulah di internal pemerintahan, Petrus Kasihw selalu menjelaskan kepada jajarannya tentang pentingnya penguatan lembaga adat di kampung-kampung. Program-

program kerja dari dinas terkait juga diamanatkan untuk memperhatikan penguatan masyarakat adat tersebut. Namun tentu saja, apa yang diungkapkan dalam pidato tidak semudah menjalankan di lapangan. Itu sudah biasa untuk birokrasi di Papua dan bahkan di Indonesia umumnya.

Petrus Kasihw bersama jajarannya di pemerintahan kemudian mencoba untuk mengkonsolidasikan lembaga-lembaga masyarakat adat di tujuh suku. Pemerintah berusaha mendorong masyarakat di kampung-kampung untuk melakukan musyawarah-musyawarah adat dan membentuk LMA (Lembaga Masyarakat Adat) atau mengaktifkan kembali lembaga adat yang sudah ada sebelumnya. Kasihw memandang bahwa lembaga adat yang kuat merupakan bagian dari pembangunan manusia tujuh suku di Teluk Bintuni. Begitu juga dengan akan hadirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat akan semakin mengakui eksistensi masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat akan kuat dan semakin menyadari hak-haknya. Masyarakat tujuh suku diharapkan juga bangkit dan mendukung program pembangunan dari pemerintah. Kasihw juga mengingatkan bahwa tidak cukup hanya menyadari hak-hak saja, tetapi juga harus membenahi diri masing-masing di kampung dengan memperkuat lembaga adat. Kasihw mencontohkan apa yang terjadi di Suku Sumuri yang berhasil membentuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang merupakan gabungan dari 19 marga. Di LMA inilah seluruh perlindungan terhadap masyarakat adat dilakukan. LMA Sumuri telah menyepakati wilayah adat masing-masing marga dan melakukan pendaftaran ke Dinas Pertanahan agar dicatatkan sertifikat sebagai hak milik.

Suku Sumuri juga telah membenahi struktur lembaga adat yang kepengurusannya terdiri dari 19 marga dan telah membagi wilayah mereka masing-masing. Catatan-catatan tentang hukum adat dan juga cerita-cerita adat dari para tetua di kampung juga sudah mulai dituliskan. Ada banyak cerita-cerita tentang sejarah marga dan pengetahuan masyarakat Suku Sumuri yang perlu dituliskan untuk pengetahuan generasi selanjutnya. Suku Sumuri bergerak selangkah lebih maju dari enam suku lainnya. Pada tahun 2018 mereka berencana untuk membangun rumah adat Sumuri dan kantor LMA yang baru.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memberikan bantuan uang tunai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada masing-masing suku untuk melakukan musyawarah adat dan membentuk LMA. Salah satu tujuan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni adalah mencari siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin di masing-masing suku.

Sampai saat ini saya masih bingung, siapa sebenarnya pemimpin dari masing-masing suku tersebut. Hampir semua mau bicara di masing-masing marga. Sangat terasa dipengaruhi oleh kekuatan marga-marga karena mereka memiliki hak. Mereka punya hak ulayat hukum adat dari marga-marga yang sama.

Petrus Kasihw menekankan kepada dua suku yang saat ini rawan terjadi konflik terus-menerus dan kehilangan kekuatan adatnya. Suku Sumuri dan Suku Sebyar adalah dua suku yang digempur oleh perusahaan untuk melakukan eksploitasi. Ia beranggapan bahwa semakin lama komunitas adat dari kedua suku tersebut dan lima suku lainnya di Teluk Bintuni akan pudar. Oleh karena itulah Ia memimpikan sebuah kampung adat di ketujuh suku yang masih bertahan di tengah perkembangan yang berjalan terus di Teluk Bintuni. Kampung-kampung adat tersebut perlu ada untuk menunjukkan eksistensi masyarakat adat. Petrus Kasihw khawatir kampung-kampung adat ini akan hilang di tengah komunitas adat. LMA setelah berdiri dari aspirasi masyarakat bertugas untuk membangun rumah adatnya masing-masing.

Sudah tentu permasalahannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh Bupati Petrus. Soalnya bukan hanya sekadar pemberian dana, membangun rumah adat, atau sekadar berkomitmen untuk memperkuat adat. Retorika tersebut tidak pernah berada pada ruang kosong hampa kuasa. Jika kita menelisik lebih dalam, kompleksitas di tengah masyarakat terjadi begitu kencang. Salah satu isu yang juga melibatkan para elit lokal, dan adat juga terlibat di dalamnya, adalah pemekaran daerah salah satu distrik di Teluk Bintuni menjadi kabupaten sendiri.

Orang-orang Papua yang “bermain” di mesin-mesin penggerak pembentukan daerah-daerah baru ini berusaha dengan berbagai cara untuk “berjuang” menghadirkan daerah-daerah baru. Tujuan mereka bukan hanya sekadar lapangan pekerjaan baru dalam berbagai bidang,

namun juga mendasarkan dirinya dengan Undang-Undang (UU) yang menjadi alasan formal dan legal (sah) mereka. Namun, meski berdasarkan UU, segala usaha untuk mewujudkan legalitas terbentuknya daerah baru dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, cara-cara inilah yang menjadi penting untuk ditelusuri dan ditelaah baik-baik.

Siasat menjadi satu kata yang penad (tepat) untuk menggambarkan keseluruhan usaha yang dipraktikkan oleh orang-orang untuk mempertahankan hidupnya. Mereka melakukan berbagai usaha untuk memanfaatkan segala sesuatu yang sekiranya menguntungkan pribadi maupun kelompoknya. Semuanya menyatakan diri melakukannya demi kebaikan yang ada di Papua. Orang-orang yang bersiasat ini membayangkan akan lahirnya kebaikan dari apa yang mereka praktikkan saat ini. Kasus pemekaran daerah dan mimpi kesejahteraan serta kemajuan menjadi contoh yang gamblang bahwa jika daerah mereka dimekarkan—berdiri sendiri menjadi kampung, distrik, kabupaten, maupun provinsi—maka mimpi tentang “tuan di negeri sendiri” akan segera terwujud.

Sayangnya dalam proses menjadi “tuan di negeri sendiri” tersebut memerlukan proses panjang yang “seolah-olah” melibatkan rakyat kebanyakan. Aspirasi “murni” untuk meraih kesejahteraan inilah yang menjadi modal penting untuk “menyuarakan” kepentingan rakyat oleh para elit mereka sendiri. Menjadi “penyambung lidah rakyat” adalah ungkapan populer untuk menggambarkan usaha menyuarakan sekaligus menyampaikan aspirasi rakyat agar didengar oleh kekuasaan. Namun apa lacur, sekali lagi persoalannya tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Para elit hanya “seolah-olah” menjadi penyambung lidah rakyat untuk kemudian melakukan siasat baku pintar saling tawar menawar kepada kekuasaan yang menguntungkan diri maupun kelompoknya. Sekali lagi, wajah dan lapisan baku pintar itu sangat rumit dan dinamis.

Rumit dan dinamisnya siasat tersebut juga mengandung kepentingan yang beragam dan rumit juga. Berbagai siasat dengan kepentingan itulah yang kemudian “bertarung”. Kompleksitas lapisan dan jaringan kepentingan silang sengkabut saling tikam dan *tumbuk* demi meraih kekuasaan yang mereka impikan. Berbagai sumber daya termanfaatkan untuk menembus tembok-tembok penyekat untuk

memperoleh dukungan. Praktik siasat juga sekarang semakin canggih dengan melibatkan cara-cara baru seperti uang dan teknologi yang terus berkembang.

Meski dengan instrument dan cara yang modern (canggih), lokus (wilayah) yang menjadi sasaran untuk dimainkan adalah masih berkarakter tradisional. Semisal adalah identitas etnik, suku, marga, dan sudah tentu adalah jaringan kekerabatan dan perkawinan. Keseluruhan modal social tersebut dikapitalisasi dan dimobilisasi untuk mendatangkan keuntungan. Praktik-praktik perebutan kekuasaan lokal di Papua berkarakter kapitalisasi modal social tradisional untuk merebut kekuasaan moderen. Ini bukan karakter Papua semata memang, namun masih diperlukan studi-studi mikro yang menggambarkan praktik siasat tersebut berjalan dengan tak terduga dan kadang-kadang mengejutkan.

Praktik siasat para elit lokal inilah yang terwariskan dalam sejarah politik kebudayaan

Papua pasca reformasi, dan kemudian menjadi fenomena pasca kolonial Indonesia. Para elit yang mempraktikkan siasat tersebut dilihat oleh masyarakat awam dan mengendap menjadi pelajaran yang kemudian hari mereka praktikkan dalam kehidupan selanjutnya. Siklus tersebut berulang terus-menerus yang memproduksi pengetahuan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tersebut lagi-lagi adalah persoalan “kebenaran”.

Akhirnya, saya mencoba untuk merenungi produksi pengetahuan tentang praktik siasat elit yang hingga kini masih menjamur di Papua. Keseluruhan penyeleidikan dan pengetahuan yang tercipta semakin menegaskan bahwa penyelenggaran kekuasaan (perjuangan pemekaran daerah dan baku pintar elit) terus-menerus menciptakan pengetahuan, dan sebaliknya, pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek kuasa. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain (Aditjondro, 1994: 59).

Gambar 4

Banner di Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat



Sumber: dokumen pribadi penulis

Penutup

Bertolak belakang dari argumentasi Broek (1996) dalam melihat sejak awal transformasi sosial yang terjadi di tanah Papua. Ia melihat bahwa masyarakat berada dalam

keadaan dimana perasaannya kurang siap menempatkan diri dalam segala perubahan yang sedang terjadi. Terdapat kesan perubahan di tengah masyarakat Papua selama ini terjadi begitu pesat hingga membingungkan. Masyarakat Papua dalam pandangan Broek kurang diberikan

kesempatan untuk mengembangkan suatu sikap untuk menanggapi perubahan tersebut atau mengembangkan suatu “perasaan buat perubahan.” Masyarakat Papua merasa kewalahan. Kewalahan untuk bersikap dan merespon perubahan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Situasi ini sangat menyulitkan yang membuat masyarakat lokal di daerah-daerah di Papua terpaksa dengan kondisi yang sudah ada, sambil mengais-ngais keuntungan yang bisa diperoleh.

Terhadap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat adalah mereka berusaha bersama untuk melindungi dirinya dan merespon dengan berbagai sikap. Terdapat dua macam sikap yang saling tercampur yaitu *pertama*, mengambil jarak saja dari segala macam perubahan, sambil melampiaskan perasaan kekurangberdayaan pada wakil perubahan. Sikap *kedua* adalah menuntut supaya pola kehidupan serta pola berpikir diindahkan, tidak diganggu, dan dinilai suci sehingga tidak terbuka untuk diubah.

Konteks yang terjadi di Teluk Bintuni menggambarkan bahwa memperkuat adat bisa bermata dua jika hanya terfokus pada romantisasi “ideologi harmoni” tanpa memeriksa relasi produksi dan kelas dalam masyarakat adat kontemporer. Merespon kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara dan investasi, gerakan masyarakat adat di Tanah Papua harus mampu merefleksikan diri dalam hubungan dengan perubahan di internal diri mereka merespon perubahan yang diangkut oleh pembangunan dan investasi. Hanya dengan memahami konteks ini mungkin masyarakat adat di Papua akan mampu untuk mengambil langkah-langkah aksi dalam menegakkan martabatnya.

Merespon perubahan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu sangat penting sekali refleksi untuk menarik pelajaran dari masa lampau, kondisi kini, dan meneropong untuk masa depan. Situasi refleksi ini mewajibkan kita membuka diri dan tidak membuat batas terhadap perubahan. Wacana adat yang didengungkan selain rentan dikuasa oleh kelompok elit untuk kepentingannya sendiri, juga terkesan romantis dengan mengulang-ngulang warisan masa lalu, termasuk unsur-unsur keyakinan. Namun sayangnya tanpa memperdengarkan suatu keterbukaan serta kesadaran bahwa terjadi perubahan di depan mata yang harus direspon.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, Geroge. (1994). “Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas, Meneropong Gerakan Lingkungan di Indonesia melalui Konsep “Kuasa/Pengetahuan” Foucault” dalam *Majalah Kalam* Edisi 1 – 1994, hlm. 59 – 64.
- Broek OFM, Drs. Theo van den. (2002). *Mengatasi Perpecahan yang Melumpuhkan*, Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura dan LSPP Jakarta.
- Darmanto. (2015). “Kapitalisasi Pedalaman dan Praktik Politik Etnografi” dalam *Jurnal Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanian*, Vol. I, Nomor I, Mei 2015.
- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Hernawan OFM, J. Budi. (2004). “Menuju ke Kota (C)emas” makalah dalam Temu Adat Masyarakat Teluk Bintuni 2004, Babo, 24-29 November 2004. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura, November 2004.
- Klinken, Gerry van. (2015). *Kelas Menengah di Kota Kupang 1930-an–1980-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (ed.). (2002). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist, Jurnal Antropologi Indonesia dan Karsa.
- Li, Tania. (2010). “Adat di Sulawesi Tengah: Penerapan Kontemporer” dalam Jamie Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed), *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sangaji, Arianto. (2012). “Masyarakat Adat, Kelas, dan Kuasa Eksklusif”. *Kompas*, 21 Juni 2012.
- Scott, James C. (1995). *State Simplifications, Some Applications to Southeast Asia*. Amsterdam: CASA.
- Timmer, Jaap. (2013). “Menentang Kulturalisme di Tanah Papua” dalam I Ngruh Suryawan, *Jiwa yang Patah*. Yogyakarta:

- Kepel Press dan Pusat Bahasa dan Budaya Papua UNIPA Manokwari.
- Timmer, Jaap. (2007). "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625.
- Widjojo, Muridan, dkk., (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.
- Widjojo, Muridan. (2001). "Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru". Paper dalam "Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia" yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori oleh The Ford Foundation pada tahun 2001.
- White, Ben. (2016). "Kelas-Kelas Perantara dan Rezim-Rezim Perantara" dalam Gerry van Klinken dan Ward Barenschot (eds), *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

